

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Politik Hukum**

##### **1. Pengertian Politik Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat<sup>7</sup>, sedangkan menurut Soeharjo, politik hukum merupakan salah satu cabang bagian dari ilmu hukum. Ilmu hukum terbagi atas sebagai berikut :

- Dogmatika hukum, memberikan penjelasan mengenai isi (in houd) hukum, makna ketentuan hukum, dan menyusunnya sesuai dengan asas-asas dalam suatu sistem hukum.
- Sejarah hukum, mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah hukum mempunyai arti penting apabila ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang.
- Ilmu perbandingan hukum, mengadakan perbandingan hukum yang berlaku di berbagai negara, meneliti kesamaan dan perbedaannya.

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm:35

- Politik hukum, bertugas meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- Ilmu hukum umum, tidak mempelajari tertib hukum tertentu, tetapi melihat hukum sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu hukum umum berusaha untuk menentukan dasar-dasar pengertian perihal hukum, kewajiban hukum, personel atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum, dan hubungan hukum.<sup>8</sup>

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Abdul Hakim Garuda berpendapat bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : (1) pembangunan hukum yang berintikan

---

<sup>8</sup> Soehardjo S.S, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia*, Diktat

<sup>9</sup> MD, Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal 1.

pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>10</sup>

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan teori tentang Politik Hukum oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara karena dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan tujuan hukum tersebut dibangun dan ditegakkan.

## **2. Politik Hukum dalam Penegakan Perundang-undangan di Indonesia**

Hukum merupakan produk lembaga politik yang membahas mengenai orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari konfigurasi pada masa atau rezim tertentu. Konfigurasi politik pada suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Pada negara yang mempunyai konfigurasi politik demokratis maka produk hukumnya akan memiliki karakter responsif/ populistik. Sedangkan di dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/ konservatif/ elitis. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk turut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi tersebut ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam

---

<sup>10</sup> Abdul hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Nasional, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

pemilihan berkala atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan berpolitik.<sup>11</sup> Pada konfigurasi politik demokratis dapat dilihat hubungan antara pemerintah dengan wakil rakyat terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap kinerja pemerintah. Konfigurasi politik demokratis menciptakan produk hukum yang berkarakter responsif/ populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum berkarakter responsif ini bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga produk hukum tersebut dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil sebagian besar inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elite penguasa untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan juga dominasi kekuasaan politik dilakukan oleh elite politik yang bersifat kekal serta adanya suatu doktrin yang membenarkan tindakan konsentrasi kekuasaan.<sup>12</sup> Pada konfigurasi ini menghasilkan produk hukum konservatif/ortodoks/elitis, yaitu produk hukum dimana isinya merupakan

---

<sup>11</sup> Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. *Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektrum Politik*. Jakarta. Penerbit: PT Gramedia. Hal 88

<sup>12</sup> Ibid.

cerminan dari kepentingan sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dan cenderung digunakan sebagai pelaksana ideologi dan program negara. Pada produk hukum ini mempunyai sifat *positivis-instrumentalis*, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan pandangan sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Adapun Philippe Nonet dan Philippe Selznick membagi dua jenis hukum yang dipengaruhi oleh rezim pembentukannya pada tabel dibawah ini:

***Tabel : Jenis Hukum berdasarkan Pengaruh Rezim***

INDIKATOR	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM
Tujuan Hukum	Ketertiban	Legitimasi/ Kesahan
Legitimasi	Pertahanan sosial dari <i>raison d'etat</i>	Menegakkan Prosedural
Peraturan	Keras dan terperinci akan tetapi mengikat secara lemah terhadap pembuat peraturan	Sangat terurai; mengikat baik bagi pembuat aturan maupun yang diatur
Penalaran (Reasoning)	<i>Ad hoc</i> ; sesuai keperluan dan bersifat partikularistik	Mengikatkan diri secara ketat kepada otoritas hukum; peka terhadap formalisme dan legalisme
Diskresi	Merata; bersifat oportunistik atau menguntungkan	Dibatasi oleh peraturan-peraturan;

	golongan	pendelegasian yang sangat terbatas
Pemaksaan	Sangat luas; pembatasannya sangat lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum
Moralitas	Moralitas komunal; moralitas hukum; dan moralitas pemaksaan	Moralitas kelembagaan, yakni diikat oleh pemikiran tentang integritas dari proses hukum
Kaitan Politik	Hukum dibuat untuk tunduk kepada politik kekuasaan	Hukum bebas dari kepentingan politik; adanya pemisahan kekuasaan
Harapan terhadap kepatuhan	Tidak bersyarat; ketidak patuhan otomatis dianggap sebagai bentuk pembangkangan	Bertolak pada peraturan yang sah, yakni menguji kesahan suatu undang-undang dan peraturan
Partisipasi	Tunduk dan patuh; kritik dianggap tidak loyal dan dituduh subversif	Dibatasi oleh prosedur yang ada; munculnya kritik hukum

**Sumber : Philippe Nonet & Philip Selznick**  
**Diolah oleh Penulis**

Tabel diatas dikembangkan oleh Philipe Nonet dan Philip Selznick yang menggambarkan bahwa apabila rezim politik di suatu negara tersebut adalah otoriter maka produk undang-undangnya cenderung bersifat represif dan apabila rezim politiknya adalah demokratis maka produk undang-undangnya adalah responsif.

Konfigurasi politik hukum pada penelitian ini akan dibagi ke dalam tiga rezim, yaitu rezim orde lama, rezim orde baru dan rezim reformasi yang digambarkan pada tabel dibawah ini:<sup>13</sup>

***Tabel : Posisi Arah Politik Pemebentukan Peraturan***

<b>INDIKATOR</b>	<b>ORDE LAMA</b>	<b>ORDE BARU</b>	<b>REFORMASI</b>
Tujuan	Legitimasi	Ketertiban	Legitimasi
Legitimasi	Keadilan Prosedural	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural
Peraturan	Luas dan rinci mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai
Pertimbangan	Sangat melekat pada otoritas legal, rentan terhadap formalism dan legisme	Adhoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat particular	Sangat melekat pada otoritas legal, rentan terhadap formalism dan legisme
Diskresi	Dibatasi oleh peraturan delegasi yang sempit	Sangat luas oportunistik	Dibatasi oleh peraturan, delegasi yang sempit
Paksaan	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Eksekutif dibatasi dengan lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum
Moralitas	Moralitas kelembagaan, yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas komunal, moralisme hukum, moralisme pembatasan	Moralitas kelembagaan, yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum
Politik	Hukum independen dari politik pemisahan kekuasaan	Hukum subordinat pada kekuasaan	Hukum independen dari kepentingan politik, pemisahan kekuasaan
Harapan akan ketaatan	Penyimpangan peraturan yang	Tanpa syarat. Ketidak taatan	Penyimpangan peraturan yang

<sup>13</sup> Jurnal tentang Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia oleh Heriyono Tardjono

	dibenarkan. Misalnya untuk menguji validitas undang-undang	person dihukum sebagai pembangkangan	dibenarkan. Misalnya untuk menguji undang- undang atau peraturan lainnya
Partisipasi	Akses dibatasi oleh prosedur baku. Muncul kritik atas hukum	Pasif. Kritik dianggap sebagai pemberontakan dan dituduh subversif	Akses dibatasi oleh prosedur baku. Muncul kritik atas hukum
Jenis Orientasi Hukum	Hukum Otonom	Hukum represif	Hukum otonom

*Sumber : Jurnal tentang Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia. Diolah oleh Penulis.*

Berdasarkan uraian dan tabel sederhana diatas dapat disimpulkan bahwa arah atau orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan perubahan orientasi dari *Otonom* pada masa Orde Lama kemudian *Represif* pada masa Orde Baru dan kembali menjadi *Otonom*. Studi beberapa peneliti hukum menunjukkan perubahan sistem politik yang otoritarian pada saat Orde Baru menjadi demokratis pada masa reformasi rupanya tidak menjadikan bentuk hukum dan pembentukan undang-undang di Indonesia meningkat menjadi *Responsif*, tetapi tetap kembali menjadi *Otonom* seperti masa Orde Lama.

## **B. Tinjauan tentang Jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat**

### **1. Pengertian Organisasi**

Organisasi berasal dari bahasa Yunani: *ὄργανον*, *organon* yang berarti alat, yaitu kelompok orang dalam suatu wadah yang mempunyai



kesamaan tujuan.<sup>14</sup> Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut:

- a. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan guna mewujudkan tujuan bersama.
- b. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Dalam berorganisasi setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang mereka pilih. Menurut Keith Devis ada tiga unsur penting dalam organisasi, yaitu :

- a. Unsur pertama adalah partisipasi dengan melibatkan mental dan perasaan, bukan hanya sekedar jasmani.
- b. Unsur kedua yaitu adanya sikap sukarela dalam membantu kelompok guna mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu.
- c. Yang ketiga adalah unsur tanggungjawab merupakan rasa yang paling menonjol dan prinsipal pada saat menjadi anggota.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi>. diakses pada 1 November 2018.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Keith Davis, *Human Relations at Work*, (New York, San Francisco, Toronto, London: 1962).Hlm.15-19

## **2. Pengertian Organisasi Masyarakat**

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup> Di Indonesia organisasi masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin menggunakan haknya untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana telah dijamin oleh negara.

## **3. Jaminan Berkumpul dan Berserikat**

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang telah meratifikasi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup> Hal ini berarti yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan dan tidak boleh dihilangkan. Sedangkan hak untuk kebebasan berserikat telah

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>18</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

diatur dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan
2. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengikuti suatu perkumpulan.<sup>19</sup>

Selain itu hak atas kebebasan berserikat juga dinyatakan dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1996 yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 pada pasal 22 ayat 1 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.”<sup>20</sup>

Selain itu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Tinjauan tentang Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara**

#### **1. Pemberian Izin dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

##### **a. Pengertian Perizinan**

Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara ada tiga, yaitu dispensasi, konsesi dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. E. Utrecht

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

berpendapat mengenai lisensi yaitu kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi.<sup>21</sup> Sedangkan Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

**b. Unsur-unsur Perizinan**

Adapun unsur-unsur perizinan diantaranya ialah:

1) Instrumen Yuridis

Dalam rangka melaksanakan tugas mengupayakan kesejahteraan umum, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dimana dari fungsi pengaturan ini memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.<sup>22</sup>

2) Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, karena tanpa dasar wewenang maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

---

<sup>21</sup> H.R, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. Hlm 205-206

<sup>22</sup> Sjachran Basah. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara. Bandung:Alumni 1985

### 3) Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah. Menurut Sjachran Basah penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.<sup>23</sup>

### 4) Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

### 5) Prosedur dan Persyaratan

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konststitufif artinya ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin tersebut ditentukan atas perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi maka dapat dikenai sanksi. Sedangkan bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan yang diisyaratkan tersebut terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan dilakukan sepihak oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak boleh menentukan syarat dengan sewenang-wenang.

---

<sup>23</sup> Ibid

### **c. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Izin memiliki fungsi untuk menertibkan masyarakat. Adapun mengenai tujuan perizinan secara umum sebagai berikut : (1) keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu; (2) izin mencegah bahaya bagi lingkungan; (3) keinginan melindungi objek tertentu; (4) izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk); (5) izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

### **d. Bentuk dan Isi Izin**

Adapun bentuk daripada izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Secara umum izin memuat hal-hal seperti organ yang berwenang, yang dialamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat, serta pemberian alasan, dan juga pemberitahuan-pembertitahuan tambahan.

## **2. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara**

Adapun macam-macam dari sanksi administrasi adalah :

### **a. Sanksi Reparatoir**

Adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, semisal paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsoom*).

b. Sanksi Punitif

Yaitu sanksi yang ditujukan guna memberikan hukuman kepada seseorang berupa denda administrative.

c. Sanksi Regresif

ialah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan seperti yang terdapat pada ketetapan yang ditertibkan.<sup>24</sup>

Terkait jenis-jenis sanksi juga diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengkategorikan sanksi ke dalam tiga hal, yaitu sanksi administratif ringan, sedang dan berat. Adapun sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sedangkan sanksi administratif sedang yaitu pembayaran uang paksa/ ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Terakhir adalah sanksi administratif berat, yakni berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap

---

<sup>24</sup> Jurnal tentang Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan oleh Ivan Fauzan Raharja, SH., MH.

tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

### 3. Pencabutan Izin dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Adapun teori yang dijadikan sebagai landasan dalam hal melakukan pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang yaitu prinsip *Contrarius Actus*. Prinsip *Contrarius Actus* adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkan. Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara Indonesia, Sudiyatmiko Ariwibowo, menjelaskan bahwa asas *contrarius actus* merupakan asas yang memiliki arti formalitas atau prosedur yang diikuti dalam proses pembentukan suatu keputusan dan diikuti proses pencabutan atau pembatalan.<sup>25</sup> Hal ini berarti Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan kembali keputusan yang telah dibuat apabila terdapat kesalahan-kesalahan wewenang, prosedur dan substansi dalam proses pemberian izin. Selain itu didalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa apabila terdapat keputusan dan/atau tindakan yang sewenang-wenang dengan menyalahgunakan jabatan maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah apabila sudah diuji dan ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti proses pencabutan izin yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus diuji terlebih dahulu dalam

---

<sup>25</sup> Sovia Hasanah, SH. Arti Asas *Contrarius Actus*. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i>



Pengadilan Tata Usaha Negara dan baru bisa dijaalankan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap.

